



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIENA RETNANINGRUM
2. Jabatan : STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 185817

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.124.391.000
1. Tanah Seluas 3360 m2 di BOYOLALI, WARISAN Rp. 90.720.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/150 m2 di SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 390.984.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/45 m2 di SEMARANG , WARISAN Rp. 124.215.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 237 m2/177 m2 di SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 518.472.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	460.000.000
1. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
2. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	192.150.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	470.444.002
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.246.985.002

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.246.985.002**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **22 November 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.